

**PEMEKARAN DAERAH AMANATUN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**TESIS
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Magister Teknik



JAROT SOLEMAN NDAONG

NIM: 136060100111002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS TEKNIK

MALANG

2018



LEMBAR PENGESAHAN
PEMEKARAN DAERAH AMANATUN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TESIS

MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Magister Teknik



JAROT SOLEMAN NDAONG
136060100111002

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 13 Juli 2018
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. Surjono, MTP
NIP. 19650518 199002 1 001

Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, S.T, M.T
NIP. 19760122 200312 1 003

Mengetahui
Ketua Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Techn. Christia Meidiana, ST., M.Eng.
NIP. 19720501 199903 2 002



IDENTITAS TIM PENGUJI

JUDUL PENELITIAN TESIS : PEMEKARAN DAERAH AMANATUN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Nama : Jarot Soleman Ndaong

No. Induk Mahasiswa : 136060100111002

Program Magister : Perencanaan Wilayah dan Kota

KOMISI PEMBIMBING:

Ketua : Dr. Ir. Surjono, MTP.

Anggota : Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT.

TIM PENGUJI:

Penguji 1 : Dr. Eng. Turniningtyas Ayu Rachmawati, ST., MT.

Penguji 2 : Gunawan Prayitno, SP., MT., Ph.D.

Tanggal Ujian : 13 Juli 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dan berdasarkan hasil penelusuran berbagai karya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang diteliti dan diulas di dalam Naskah Tesis ini adalah asli dari pemikiran saya. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 23 Juli 2018
Mahasiswa,

JAROT SOLEMAN NDAONG
NIM. 136060100111002

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sallu Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 September 1989, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari Bapak Adrianus Ndaong dan Ibu Nur Marum.

Penulis memulai pendidikan formal di TK Dharma Wanita Kecamatan Miomaffo Barat dan lulus pada tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Inpres Fatumfaun dan lulus pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Soe dan lulus pada tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan SMA di SMAN 1 Soe dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Institut Teknologi Nasional Malang dan lulus pada bulan maret Tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan kuliah ke jenjang S2 di Universitas Brawijaya Malang.

Malang, 23 Juli 2018

Mahasiswa,

JAROT SOLEMAN NDAONG

NIM. 136060100111002

UCAPAN TERIMAKASIH

Terselesaikannya penulisan Tesis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis patut menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. TUHAN YANG MAHA ESA atas segala kemudahan, kelancaran, berkat dan pertolongan yang diberikan;
2. Orang tua saya, bapak Adrianus Ndaong, Ibu Nur Marum, Saudara saya Terry Kencana Ndaong, Nemay Anggadewi Ndaong dan Alip Prawiro Ndaong serta Kakak ipar saya Denny A Letor dan Aprianto Alle atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada saya;
3. Ibu Dr. Techn. Christia Meidiana, ST., M.Eng selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya;
4. Komisi dosen pembimbing Tesis Bapak Dr.Ir.Surjono, MTP dan Bapak Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya,ST.,MT. yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam setiap penyusunan Tesis;
5. Dosen Penguji Ibu Dr. Eng. Turniningtyas Ayu Rachmawati, ST.,MT dan Bapak Gunawan Prayitno SP.,MT.,Ph.D. yang telah memberikan masukan dalam proses penyempurnaan Tesis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan Magister;
7. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta SKPD terkait yang telah memberikan izin dan data-data sekunder yang dibutuhkan selama penyusunan Tesis;
8. Seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai responden yang bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam kegiatan survei;
9. Teman angkatan 2013 yang telah membantu dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan.

Malang 23 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Jarot Soleman Ndaong, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. **Pemekaran Daerah Amanatun Kabupaten Timor Tengah Selatan.** Dosen Pembimbing Dr.Ir. Surjono, MTP dan Dr.Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST.MT.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas wilayah 3955,36 km², serta 32 kecamatan dan penduduk 459.310 jiwa dimana memiliki jumlah kecamatan dan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terjadi pelayanan pemerintahan yang tidak optimal. Salah satu solusinya adalah pemekaran daerah, hal inilah yang kemudian terjadi usulan pemekaran daerah Amanatun. Nama Amanatun sendiri merupakan sebuah swapraja (kerajaan) pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang pada saat itu masuk dalam *Afdeeling* (Kabupaten) Timor Tengah Selatan. Usulan Pemekaran daerah Amanatun tentu memiliki latar belakang yang menjadi pemicu serta tujuan dari masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa saja sebagai pemicu dan tujuan yang diharapkan dari adanya pemekaran Kabupaten Amanatun serta adakah hubungan antara pemicu dan tujuan dari pemekaran daerah Amanatun dan bagaimana bentuk pemekaran daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan. Proses analisis menggunakan *partial least square* (PLS) dan tingkat kelayakan pemekaran berdasarkan pedoman peraturan pemerintah.

Kata Kunci : pemekaran daerah, pemicu, tujuan, PLS, tingkat kelayakan.

SUMMARY

Jarot Soleman Ndaong, Master Program of Urban and Regional Planning, Faculty Of Engineering, Brawijaya University. **Enlargement of Amanatun, South Central Timor Regency**. Supervisor Dr.Ir. Surjono, MTP and Dr.Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST.MT.

South Central Timor Regency is one of the Regency within the Province of East Nusa Tenggara. It lies on 3955,36 km² with 32 Sub-Districts and population of 459.310 people which made it as Regency with most Kecamatan (Sub-District) and most populated area in Province of East Nusa Tenggara. Thus, due it its large size, less optimum service of regional government regarding might occur. One solution offered for this issue was regional enlargement, which become the proposed enlargement of Amanatun. Amanatun was taken from the name of a kingdom during West Indies governance, which was includes in *Afdeeling* (Regency) South Central Timor. This proposition of Amanatun enlargement was having its own background that became the trigger and objectives of the people who desire this enlargement. Objectives of this study was to discover the triggers and objectives expected from Amanatun enlargement and whether there was relationship between the trigger and objectives of Amanatun enlargement also what is the form of this enlargement according to the prevails laws and regulations. Analysis process was using *Partial Least Square* (PLS) and appropriateness level for enlargement was based on government regulation guidelines.

Keyword: regional enlargement, trigger, objectives, relationship between effect of trigger toward objectives of enlargement, PLS, appropriateness level of enlargement based on laws and regulations





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tesis dengan judul **“PEMEKARAN DAERAH AMANATUN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”**. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemicu dan tujuan yang melatarbelakangi rencana pemekaran Kabupaten Amanatun serta bagaimana kelayakan pemekaran yang ada. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah banyak membantu proses penyusunan laporan ini mulai dari ide, bimbingan, arahan, bantuan moril maupun materil sehingga tersusunlah laporan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangaun sangat kami harapkan. Semoga laporan penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Malang, 23 Juli 2018

Mahasiswa,

JAROT SOLEMAN NDAONG

NIM. 136060100111002

DAFTAR ISI

Judul i

Pengesahan ii

Identitas Tim Penguji iii

Pernyataan Orisinalitas iv

Riwayat Hidup v

Ucapan Terima Kasih vi

Ringkasan vii

Summary viii

Kata Pengantar ix

Daftar Isi x

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 2

1.3. Rumusan Masalah 3

1.4. Tujuan dan Sasaran 3

 1.4.1. Tujuan 3

 1.4.2. Sasaran 3

1.5. Ruang Lingkup Studi 4

 1.5.1. Ruang Lingkup Lokasi 4

 1.5.2. Ruang Lingkup Materi 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1. Pengertian Pemekaran Daerah 9

2.2. Penataan Daerah sebagai Pendekatan dalam Pemekaran Daerah 10

 2.2.1 Faktor Pemicu Pemekaran Daerah 15

 2.2.2 Tujuan Pemekaran Daerah 19

 2.2.3. Faktor Kelayakan Pemekaran Daerah 21

2.3. Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-undang 32 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah 22

 2.3.1. Persyaratan Dasar 23

 2.3.2. Persyaratan Administratif 24

2.4. Syarat Pemekaran Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
78 Tahun 2007 24

 2.4.1. Kelayakan Pemekaran Kabupaten
(Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007) 28

2.5. Metode *Structural Equation Modeling - Partial Least Square*
(PLS-SEM) 29

2.6. Penelitian Terdahulu 42

2.7. Kerangka Teori 47



BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir 48

3.2. Hipotesis Penelitian 49

3.3. Diagram Alir Penelitian 49

3.4. Definisi Operasional 51

3.5. Penentuan Variabel Penelitian 52

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Metode Pengumpulan Data 57

4.1.1. Survey Primer 57

4.1.2. Survey Sekunder 59

4.1.3. Periode Survey 59

4.2. Populasi dan Sampel 60

4.2.1. Populasi 60

4.2.2. Sampel 60

4.3. Metode Analisis Data 61

4.3.1. Analisa *Partial Least Square (PLS)* 61

4.3.2. Analisa Kelayakan Pemekaran Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007 67

4.4. Desain Survey 71

4.5. Kerangka Analisis 77

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan 79

5.1.1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan 79

5.1.2. Kondisi Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan 80

5.1.3. Penggunaan Lahan 81

5.2. Gambaran Umum Pemekaran Daerah Amanatun 84

5.2.1. Dasar pemikiran Pemekaran Daerah Amanatun 84

5.3. Analisa *Partial Least Square (PLS)* 87

5.4. Analisa Tingkat Kelayakan Pemekaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007 94

5.4.1. Kependudukan 95

5.4.2. Kemampuan Ekonomi 99

5.4.3. Potensi Daerah 102

5.4.4. Kemampuan Keuangan 116

5.4.5. Sosial Budaya 119

5.4.6. Sosial Politik 122

5.4.7. Luas Daerah 124

5.4.8. Pertahanan 126

5.4.9. Keamanan 127

5.4.10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 128

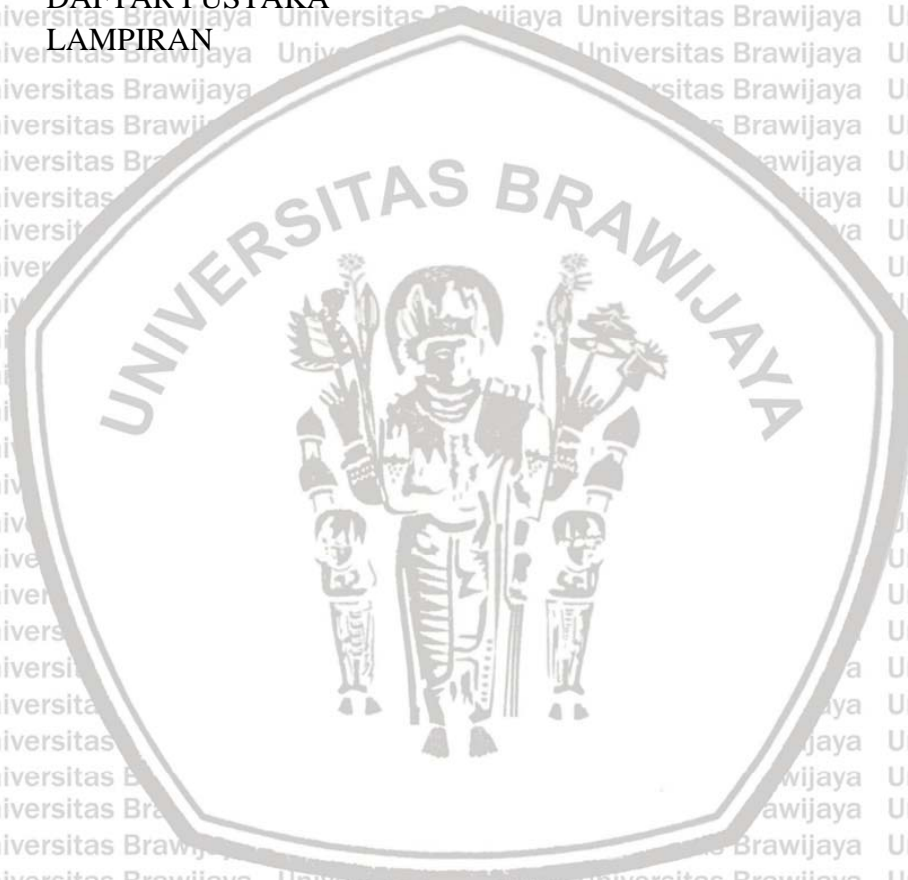
5.4.11. Rentang Kendali	129
5.4.12. Hasil Analisis Toatal dan Skoring	131
5.5. Analisis Pemekaran Daerah Amanatun Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014	134
5.5.1. Persyaratan Dasar	134
5.5.1.1. Persyaratan Dasar Kewilayahan	134
5.5.1.2. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah	140

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	150
6.2. Saran	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Faktor Dan Indikator Dalam Rangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru	28
Tabel 2.2	Perbandingan antara CB-SEM dan PLS-SEM	31
Tabel 2.3	Skema Pertanyaan Skala <i>Likert</i>	42
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1	Rangkuman Teori	52
Tabel 3.2	Variabel Penelitian	54
Tabel 4.1	Data Observasi Lapangan	57
Tabel 4.2	Data Kuisisioner	58
Tabel 4.3	Data Dokumentasi Lapangan	58
Tabel 4.4	Data-data dari Instansi	59
Tabel 4.5	Istilah yang digunakan dalam <i>PLS</i>	61
Tabel 4.6	Variabel-variabel dalam model persamaan <i>PLS</i>	62
Tabel 4.7	Skema Pertanyaan Skala <i>Likert</i> Pemicu Pemekaran Daerah Amanatun	65
Tabel 4.8	Skema Pernyataan <i>Numeric Rating Scale</i> dalam menilai tujuan Pemekaran Daerah Amanatun	66
Tabel 4.9	Skala Penilaian dan Pemberian Skor	67
Tabel 4.10	Penentuan Bobot Untuk Setiap Indikator Pembentukan Kabupaten Sesuai PP Nomor 78 Tahun 2007	68
Tabel 4.11	Kategori Pemekaran Daerah	69
Tabel 4.12	Desain Survey Penelitian	71
Tabel 5.1	Nama Kecamatan, luas wilayah dan presentase luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	80
Tabel 5.2	Penggunaan Lahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.....	84
Tabel 5.3	Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan.....	86
Tabel 5.4	Variabel-variabel dalam persamaan <i>PLS</i>	87
Tabel 5.5	Nilai <i>Loading</i> antar indikator hasil <i>PLS Algorithm</i>	89
Tabel 5.6	Nilai <i>Loading</i> dan <i>Variance inflation factor</i> (VIF) antara indikator	90
Tabel 5.7	Nilai <i>cross loading</i>	90
Tabel 5.8	Nilai <i>Avarage Variance Extracted</i> (AVE).....	91
Tabel 5.9	Nilai <i>Mean, Standart Deviation, T Statistics, P Values</i>	94
Tabel 5.10	Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	96
Tabel 5.11	Perbandingan Kepadatan Penduduk Pemekaran Kabupaten Amanatun dengan Kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	97
Tabel 5.12	Skor Kependudukan Pemekaran Daerah Amanatun.....	98



Tabel 5.13	Skor Kependudukan Kabupaten Induk Timor Tengah Selatan	98
Tabel 5.14	PDRB Perkapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur	99
Tabel 5.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
Tabel 5.16	Kontribusi PDRB Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	101
Tabel 5.17	Skor Kemampuan Ekonomi Pemekaran Daerah Amanatun	102
Tabel 5.18	Rasio Bank dan Lembaga Non Bank Per 10.000 penduduk Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	102
Tabel 5.19	Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 di Provinsi Nusa Tenggara Timur	103
Tabel 5.20	Rasio Pasar Per 10.000 penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur	104
Tabel 5.21	Rasio Sekolah Per Penduduk usia sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	105
Tabel 5.22	Rasio SLTP Per Penduduk usia sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	106
Tabel 5.23	Rasio SLTA Per Penduduk usia SLTA di Provinsi Nusa Tenggara Timur	107
Tabel 5.24	Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	108
Tabel 5.25	Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	109
Tabel 5.26	Presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan Bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	110
Tabel 5.27	Presentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	111
Tabel 5.28	Rasio Panjang jalan terhadap jumlah penduduk bermotor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	112
Tabel 5.29	Presentase Pekerja yang berpendidikan minimal SLTA Terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	113
Tabel 5.30	Presentase Pekerja yang berpendidikan minimal S-1 Terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	114
Tabel 5.31	Rasio pegawai sipil terhadap jumlah penduduk Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	115
Tabel 5.32	Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri Per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	116
Tabel 5.33	Rasio Pendapatan Daerah Sendiri Per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	117

Tabel 5.34	Rasio Pendapatan Daerah Sendiri Terhadap PDRB per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	118
Tabel 5.35	Rasio jumlah tempat peribadatan per 10.000 Penduduk Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	119
Tabel 5.36	Rasio fasilitas lapangan olahrag per 10.000 Penduduk Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	120
Tabel 5.37	Jumlah balai pertemuan per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	121
Tabel 5.38	Rasio Penduduk yang ikut Pemilu Legislatif dan Penduduk yang mempunyai hak pilih per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	122
Tabel 5.39	Jumlah organisasi kemasyarakatan per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	123
Tabel 5.40	Luas wilayah keseluruhan per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	124
Tabel 5.41	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	125
Tabel 5.42	Rasio jumlah personel pertahanan terhadap luas daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	126
Tabel 5.43	Karakteristik wilayah dari sudut pandang pertahanan antara Kabupaten T.T.S dan Pemekaran Daerah Amanatun	127
Tabel 5.44	Karektiristik wilayah dari sudut pandang pertahanan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	127
Tabel 5.45	Indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur	128
Tabel 5.46	Rata-rata jarak ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	129
Tabel 5.47	Rata-rata waktu perjalanan dari ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	130
Tabel 5.48	Analisa Skoring Indikator Pemekaran Daerah Amanatun Berdasarkan PP 78 Tahun 2007.....	131
Tabel 5.49	Luas Wilayah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	134
Tabel 5.50	Luas Wilayah Kabupaten di Pulau Timor.....	135
Tabel 5.51	Jumlah penduduk dan rata-rata penduduk per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.....	136
Tabel 5.52	Jumlah penduduk dan rata-rata penduduk per Kabupaten Di Pulau Timor	137
Tabel 5.53	Nama kecamatan beserta desa/kelurahan di wilayah Pembentukan daerah Kabupaten Amanatun.....	139
Tabel 5.54	Tahun pembentukan Kecamatan di Pemekaran Amanatun	139
Tabel 5.55	Distribusi penduduk per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	141

Tabel 5.56	Pendapatan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun anggaran 2014-2105	143
Tabel 5.57	Potensi bahan tambang, lokasi, cadangan deposit dan jenis Hasil tambang di Daerah Pemekaran Amanatun	144
Tabel 5.58	Populasi Ternak sapi dan babi di Daerah Pemekaran Amanatun	145
Tabel 5.59	Neraca Daerah Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan ..	146
Tabel 5.60	Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2009-2013	149
Tabel 5.61	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan	150



DAFTAR GAMBAR

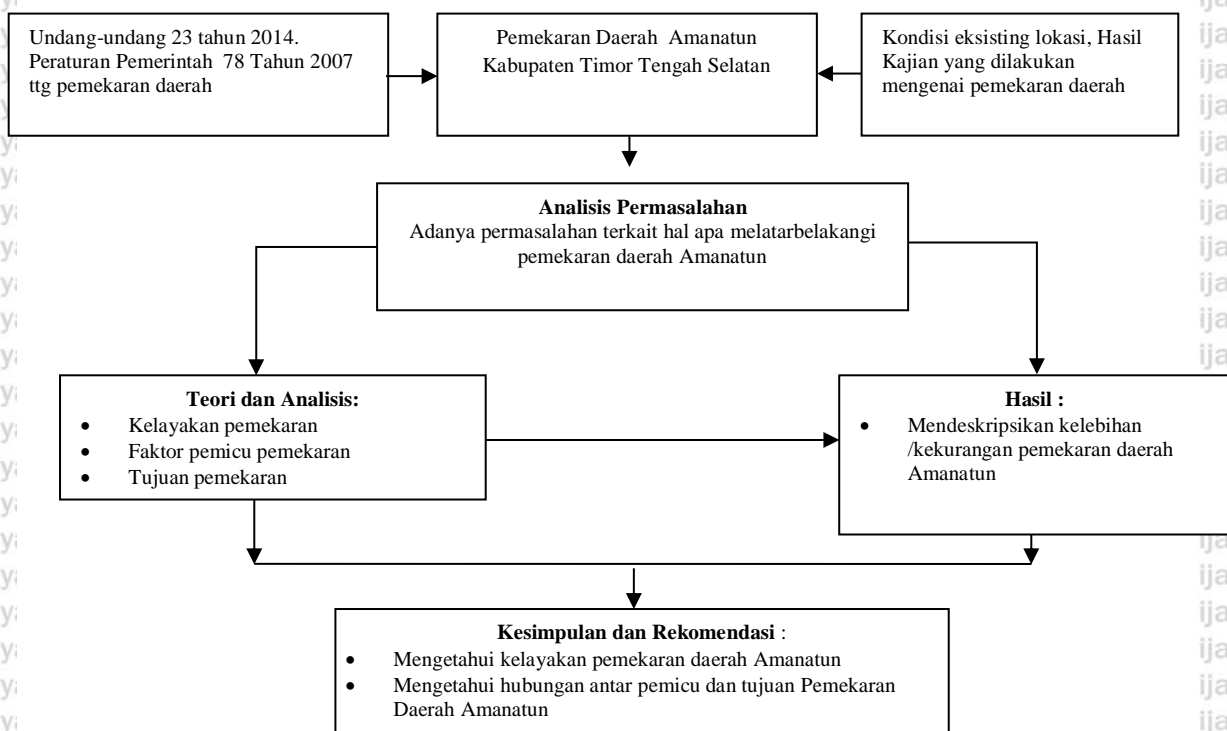
No	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan.....	6
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan Setelah Pemekaran	7
Gambar 1.3	Peta Calon Kabupaten Amanatun	8
Gambar 2.1	Hubungan Antar Variabel dan Indikator Dalam Model PLS	35
Gambar 2.2	Model PLS	36
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Penelitian	48
Gambar 3.2	Diagram Alir Penelitian	50
Gambar 4.1	Model Struktural PLS	63
Gambar 5.1	Masa Kerajaan Kabupaten Timor Tengah Selatan	79
Gambar 5.2	Presentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	81
Gambar 5.3	Peta Admistrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan	82
Gambar 5.4	Penggunaan Lahan Kabupaten Timor Tengah Selatan	83
Gambar 5.5	Batas Administrasi Pemekaran Kabupaten Amanatun	85
Gambar 5.6	Kondisi Jalan di Daerah Pemekaran Kabupaten Amanatun	86
Gambar 5.7	Model Diagram Jalur PLS dengan <i>software SmartPLS</i>	87
Gambar 5.8	Hasil Perhitungan <i>PLS Algorithm</i>	89
Gambar 5.9	Hasil Perhitungan Ulang <i>PLS Algorithm</i>	90
Gambar 5.10	Nilai <i>Composite Reliability (PC)</i>	92
Gambar 5.11	Nilai <i>R-Square (R²)</i>	93
Gambar 5.12	Perbandingan Jumlah Penduduk Pemekaran Kabupaten Amanatun dan Kabupaten Timor Tengah Selatan	97
Gambar 5.13	Perbandingan Skor Kependudukan	99
Gambar 5.14	Distribusi Penduduk per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	142
Gambar 5.15	Presentase Pendapatan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015	143
Gambar 5.16	Populasi Ternak Sapi dan Babi di Daerah Pemekaran Kabupaten Amanatun Tahun 2011-2012.....	145

BAB III
KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Kerangka konsep penelitian merupakan bagian dari penelitian yang berisi tentang masalah yang akan diteliti ataupun berhubungan dengan penelitian dan dibuat dalam bentuk diagram (Hidayat,2007). Adapun isi dari bab ini terdiri dari kerangka pikir, dan definisi operasional.

3.1 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian

3.2 Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis menggunakan analisa PLS metode *resampling bootstrap* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t , dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

Hipotesis statistik untuk *outer model* adalah :

$$H_0 : \lambda_i = 0 \text{ lawan}$$

$$H_1 : \lambda_i \neq 0$$

Sedangkan hipotesis statistik untuk *inner model* : pengaruh variabel laten eksogen terhadap endogen adalah :

$$H_0 : \gamma_i = 0 \text{ lawan}$$

$$H_1 : \gamma_i \neq 0$$

rumusan masalah ada pengaruh pemicu pemekaran terhadap tujuan pemekaran daerah Amanatun.

Hipotesis Statistik :

$H_a = 0$, tidak ada pengaruh antara pemicu pemekaran dengan tujuan pemekaran daerah Amanatun

$H_a \neq 0$, Ada pengaruh antara pemicu pemekaran dengan tujuan pemekaran daerah Amanatun

3.3 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung proses penelitian yang akan dibuat agar penelitian dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

Diagram alir penelitian secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Pendahuluan

LATAR BELAKANG

Kajian Pustaka, Jurnal, Observasi, Studi Terdahulu

RUMUSAN MASALAH

Identifikasi Masalah/Issue

PENGUMPULAN DATA

Input

Data primer

1. Observasi
2. Wawancara, Kuisisioner (*Purposive Sampling*)
 - Kebijakan terkait pemekaran
 - Faktor Pemicu pemekaran
 - Tujuan Pemekaran
4. dokumentasi

Data sekunder

1. Undang-undang dan Peraturan
 - UU nomor 23 Tahun 2014, UU nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007
2. Studi Literatur
 - Pemicu Pemekaran, Tujuan Pemekaran, Kelayakan Pemekaran (Sjafrizal,2008. Tenrini, 2013. Alfirdaus,2007.DSF 2014)
 - Penataan daerah sebagai penataan institusi (Alfirdaus,2007)
 - Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia (Khairullah,2006)
 - Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia (Partnership Policy Paper No1/2011)
 - Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran/EDOHP(Dirjen otonomi daerah, kemendagri,2011)
2. Instansi
 - Data Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka
 - RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - RTRW Kabupaten Timor Tengah Selatan

Proses

KOMPILASI DATA

Faktor pemicu dan tujuan pemekaran

PP 78 tahun 2007

Faktor pemicu pemekaran Amanatun

Tujuan Pemekaran Amanatun

Tingkat Kelayakan Pemekaran daerah Amanatun

Rekomendasi

Ditolak

PLS

Output

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu kegiatan atau penelitian. Definisi operasional digunakan sebagai kerangka acuan dalam pembahasan penelitian mengenai “Pemekaran daerah Amanatun Kabupaten Timor Tengah Selatan”. Adapun definisi operasional tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemekaran

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1) Berkembang menjadi terbuka 2) Menjadi besar dan gembung 3) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus 4) Mulai timbul dan berkembang.

2. Daerah

Secara umum, definisi Daerah menurut Nia K. Pontoh dalam bukunya yang berjudul Pengantar Perencanaan Perkotaan (2008), adalah suatu wilayah teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Definisi lain dari daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Contohnya adalah daerah-daerah otonom seperti yang dimaksud oleh Undang-undang No. 22 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah di Daerah: Daerah Provinsi; Daerah Kabupaten; Daerah Kota.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

3. Pemekaran Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, pemekaran daerah adalah pemecahan propinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

3.5 Penentuan Variabel Penelitian

Penelitian penggunaan variabel penelitian dilakukan menggunakan pendekatan permintaan (*demand side*) dimana ada 2 tujuan utama dari pendekatan ini yakni faktor pemicu pemekaran dan faktor tingkat kelayakan. Dari berbagai teori yang telah dijabarkan sebelumnya maka berikut ini adalah rangkuman teori beserta variabel dan aspek

Tabel 3.1. Rangkuman Teori

No.	Teori	Variabel	Aspek
1.	<i>Sjafrizal, 2008</i> Pemekaran daerah adalah pemisahan suatu wilayah dari administrasi lama untuk membentuk daerah administrasi baru dapat muncul dalam tiga bentuk, yaitu : pemisahan (<i>split-off</i>), perluasan (<i>enlarging</i>) dan penyatuan (<i>amalgamation</i>). Dimana secara umum pemekaran di Indonesia biasanya berupa pemisahan dan diawali dengan permintaan masyarakat yang disalurkan melalui lembaga resmi daerah, pendekatan dalam pemekaran daerah dari sisi permintaan (<i>demand side</i>) ada 2 hal utama yang perlu dikaji yakni factor pemicu dan tingkat kelayakan pemekaran.	- Faktor Pemicu Pemekaran o Perbedaan agama o Perbedaan etnis dan budaya o Ketimpangan pembangunan ekonomi o Luas daerah - Faktor tingkat kelayakan pemekaran daerah o Kemampuan keuangan daerah o Pertumbuhan ekonomi daerah o Kualitas sumberdaya manusia	
2.	<i>USAID, 2006</i> Penataan wilayah atau <i>territorial reform</i> mencakup pemekaran daerah yaitu berupa pemekaran daerah berupa pembentukan, penggabungan maupun pemecahan suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah baru yang berdiri sendiri dalam sebuah wilayah negara. Penjabarannya mencakup pemekaran (<i>secession</i>), pemecahan (<i>partitionism</i>) dan penggabungan wilayah (<i>amalgamation</i>).	3 faktor pemicu menurut <i>Erlingsson</i> : - <i>Economic driven</i> - <i>Cultural driven</i> - <i>Political driven</i> 2 faktor pemicu menurut <i>Conversi</i> : - <i>Ethnically driven</i> - <i>Territorial driven</i>	PEMILU PEMEKARAN DAERAH
3.	<i>Tenrini Rita Helbra, 2013</i> Usulan pemekaran daerah hendaknya merupakan aspirasi masyarakat yang ingin membentuk daerah sendiri dan diharapkan pemekaran daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.	Pemicu pemekaran : - Timbangnya pemerataan dan keadilan - Kondisi geografis yang luas - Perbedaan kultur dan budaya - Dana intensif fiskal - Status kekuasaan	
4.	<i>Decentralization Support Facility, 2007</i>	- Ketimpangan ekonomi - Luasnya rentang kendali - Representasi politik - Limpahan Fiskal	
5.	<i>Profesor Sjafrizal</i>	- Faktor tingkat kelayakan pemekaran daerah	TINGKAT KELAYAKAN

No.	Teori	Variabel	Aspek
6.	<i>Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kemampuan keuangan daerah ○ Pertumbuhan ekonomi daerah ○ Kualitas sumberdaya manusia <p>Syarat suatu Kabupaten sudah bisa dimekarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia Penyelenggaraan pemerintahan minimal sudah 7 (tujuh) tahun 2. Pemekaran daerah harus memenuhi beberapa syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. Syarat Administratif b. Syarat Teknis c. Syarat Fisik <p>Secara teknis ada beberapa variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat kelayakan pemekaran daerah diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kependudukan - Kemampuan Ekonomi - Potensi Daerah - Kemampuan Keuangan - Sosial Budaya - Sosial Politik - Luas Daerah - Pertahanan - Keamanan - Tingkat Kesejahteraan Masyarakat - Rentang Kendali 	PEMEKARAN DAERAH
6	<i>Samosir, 2013</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan publik yang lebih baik - Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk berbasis potensi lokal - Penyerapan tenaga kerja secara luas di sektor pemerintahan 	TUJUAN PEMEKARAN DAERAH
7	<i>PP No. 129 tahun 2000</i>	<ul style="list-style-type: none"> - pelayanan kepada masyarakat - meningkatkan kehidupan berdemokrasi - meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, 	

No.	Teori	Variabel	Aspek
8	<i>Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i>	- dan meningkatkan keamanan dan ketertiban - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat - Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi - Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah - Percepatan pengelolaan potensi daerah - Peningkatan keamanan dan ketertiban - Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah	

Sumber : Hasil analisa

Dari rangkuman teori yang telah dipaparkan diatas, maka proses selanjutnya adalah seleksi variabel. Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Variabel penelitian merupakan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan mengacu pada sasaran yang akan dicapai. Dalam seleksi ini, variabel yang dipilih adalah variabel yang sama pada tiap aspek. Maka didapat beberapa variabel terkait pemekaran daerah Amanatun yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Variabel Penelitian

No	Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Sumber/penelitian
1.	Mengetahui Tingkat kelayakan pemekaran daerah Amanatun	- Kependudukan - Kemampuan Ekonomi - Potensi Daerah - Kemampuan Keuangan - Sosial Budaya - Sosial Politik - Luas Daerah - Pertahanan - Keamanan - Tingkat kesejahteraan masyarakat - Rentang Kendali	- Jumlah Penduduk - Kepadatan Penduduk - PDRB non migas - Pertumbuhan ekonomi - Kontribusi PDRB non migas - Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk - Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk - Rasio pasar per 10.000 penduduk - Rasio sekolah SD per penduduk usia SD - Rasio sekolah SMP per penduduk usia SMP - Rasio sekolah SMA per penduduk usia SMA - Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk - Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk - Presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau	PP 78 tahun 2007

No	Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Sumber/penelitian
			perahu atau perahu motor atau kapal motor	
			- Presentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	
			- Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	
			- Presentase pekerja yang berpendidikan minimal SMA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	
			- Presentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	
			- Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	
			- Jumlah PDS	
			- Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	
			- Rasio PDS terhadap PDRB non migas	
			- Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	
			- Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	
			- Jumlah balai pertemuan	
			- Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih	
			- Jumlah organisasi kemasyarakatan	
			- Luas wilayah keseluruhan	
			- Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	
			- Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	
			- Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	
			- Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	
			- Indeks Pembangunan Manusia	
			- Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintah (propinsi atau kabupaten/kota)	
			- Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintah (provinsi atau kabupaten/kota)	
2.	Menilai Faktor Pemicu pemekaran,	- Perbedaan Agama - Perbedaan Etnis - Ketimpangan Ekonomi - Luas daerah - Politik - Limpahan Fiskal	- Proporsi penduduk antar umat beragama - Konflik antar agama - Proporsi perbedaan etnis (budaya) - Konflik antar etnis - Indeks Williamson (PDRB Per Kapita dengan jumlah penduduk) - Luas wilayah dan jangkauan pelayanan	- Profesor Sjafrizal - Rita Helbra - Tenrini - DSF 2007 - USAID 2006

No	Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Sumber/penelitian
			- Rentang kendali (jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten)	
			- Representasi politik masyarakat dalam pemerintahan	
			- Presentase DAU dan DAK	
3.	Menentukan tujuan yang ingin dicapai dari pemekaran daerah Amanatun	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Publik - Pertumbuhan kehidupan berdemokrasi masyarakat - Penyerapan tenaga kerja secara luas - Mempercepat Pertumbuhan ekonomi penduduk - Meningkatkan pengelolaan potensi lokal daerah - Meningkatkan keamanan dan ketertiban - Peningkatan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah 		<ul style="list-style-type: none"> - Hermanislamet (2005) - UU no 32 tahun 2004 - PP no 129 tahun 2000
4.	Menguji pengaruh pemicu pemekaran terhadap tujuan pemekaran daerah Amanatun	<ul style="list-style-type: none"> - Menguji hipotesis dengan bantuan t-statistik dalam PLS 		Imam Ghozali

Sumber : Hasil analisa

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan Pemekaran Daerah Amanatun yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisa PLS dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

- a. Pemicu pemekaran Kabupaten Amanatun adalah ketimpangan ekonomi dan luas daerah
- b. Tujuan pemekaran Kabupaten Amanatun adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan keamanan dan ketertiban
- c. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada hubungan pengaruh antara pemicu pemekaran daerah Amanatun terhadap tujuan pemekaran daerah Amanatun sebesar 37,2 %

2. Berdasarkan Analisis perhitungan tingkat kelayakan pemekaran Kabupaten Amanatun berdasarkan PP 78 tahun 2007 dimana pemekaran Kabupaten Amanatun mendapat skor total adalah 403 hal ini berarti masuk ke dalam kategori mampu dan direkomendasikan untuk dimekarkan.

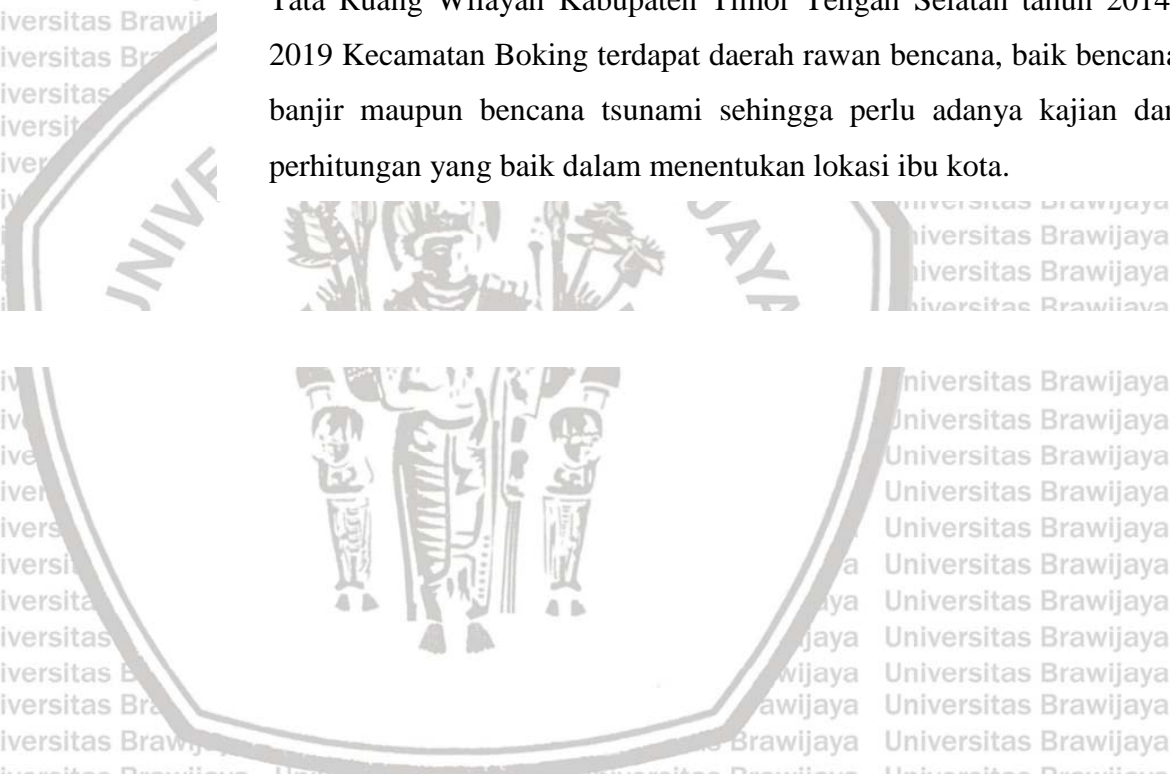
6.2. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian terkait pemekaran Kabupaten Amanatun adalah :

- a. Bagi Pemerintah Daerah, perlu adanya perbaikan, khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Induk Timor Tengah Selatan yang belum dimuatnya rencana tentang Pemekaran Daerah Amanatun.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, perlu dibuatnya konsep rencana tata ruang wilayah untuk daerah pemekaran Amanatun.
- c. Bagi Penelitian selanjutnya, apabila peraturan pemerintah pendamping undang-undang 23 tahun 2014 khususnya tentang pemekaran daerah sudah diterbitkan maka perlu dikaji ulang mengenai aspek syarat pemekaran daerah.

d. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- Belum adanya peraturan pemerintah pendamping undang-undang 23 Tahun 2014 khususnya tentang pemekaran daerah yang menyebabkan belum bisanya pelaksanaan perhitungan dalam menentukan kelayakan pemekaran daerah Amanatun
- Dari hasil wawancara, penentuan lokasi ibukota untuk pemekaran Amanatun adalah di kecamatan Boking, sedangkan dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2014-2019 Kecamatan Boking terdapat daerah rawan bencana, baik bencana banjir maupun bencana tsunami sehingga perlu adanya kajian dan perhitungan yang baik dalam menentukan lokasi ibu kota.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahadjo. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Alfirdaus, K & Bayo, L. 2007. *Penataan Daerah Sebagai Penataan Institusi (Territorial Reform as Institutional Building and Reform)*. Seminar Internasional PERCIK ke-8
- Arianti, N, N & Cahyadinata, I. 2013. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu*. Laporan Kegiatan Penelitian. Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan United Nation Development Program. 2007, *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*.
- Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri. 2011, *Laporan hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP)*.
- Gede, N. S., Made. 2008. *Pemodelan Persamaan Struktural Dengan Partial Least Square*, Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika.
- Ghozali, Iman. 2014. *Structrural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, H, Dr. *Implikasi Pengalihan Sistem Pemerintahan Sentralistik ke Sistem Otonomi Daerah Terhadap NKRI Paska Perubahan UUD 1945*
- Khairullah dan Chayadin, M. 2006. *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 11
- Noor, M. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta : Interpena
- O'Leary, Brendan. 2006, *Analyzing Partition: Definition, Classification and Explanation (Working Paper): Mapping Frontiers, Plotting Pathways Working Paper No.27*.
- Partnership For Governance Reform in Indonesia. 2011. *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia*. Partnership Policy Paper No 1/2011
- Puspitasari, R. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan)*. Jom FISIP Vol 1 no 2 – Oktober 2014
- Samosir, P, A. 2013. *Pemekaran Daerah : Kebutuhan atau Euforia Demokrasi ? Mengurangi Regulasi Pemekaran*.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang : Badouse Media.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Tennini, H, R. 2013. *Pemekaran Daerah : Kebutuhan atau Euforia Demokrasi ? Mengapa Harus Mekar ?*.

Ulum, Miftahul. Tirta, Made. Anggraeni, Dian. 2014, *Analisis Structural Equation Modeling (SEM) untuk Sampel Kecil dengan Pendekatan Partial Least Square (PLS)*, Prosiding Seminar Nasional Matematika: Universitas Jember.

Vinzi, V.E., Chin, W.W., Henseler, J., dan Wang, H. 2010. *Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications*. Germany: Springer.

Yamin, S. dan Kurniawan, H., 2009, *Structural Equation Modeling: Belajar Lebih Mudah Teknik Analisa Data Kuisisioner dengan LISREL-PLS*, Buku Seri Kedua, Jakarta: Salemba Infotek.

Undang-undang, Peraturan dan Produk Pemerintah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2017). *Provinsi Nusa Tenggara Dalam Angka 2016*. Kupang : BPS 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2017). *Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka 2016*. Soe: BPS 2017

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2012). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032*

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (2014). *RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019*

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Daerah

Internet :

Exponnt.com <http://www.exponnt.com/dob-amanatun-terganjal-pp-baru/> (diakses 11 Desember 2015)

Sinar Harapan.co.id <http://sinarharapan.co/news/read/140814116/amanatun-layak-jadi-daerah-otonom-baru> (diakses 11 agustus 2014)

Statsdata -- Partial Least Square <http://www.statsdata.my.id/2012/07/partial-least-square.html> (diakses 12 september 2016).

Tempo.co <http://www.tempo.co/read/news/2015/05/07/058664188/NTT-Usulkan-7-Daerah-Otonom-Baru> (diakses 7 mei 2015)

TimorExpress.co.id <http://timorexpress.fajar.co.id/2016/05/17/pemekaran-amanatun-temui-titik-terang/> (diakses 17 mei 2016)